

DEFICIT SPENDING DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENDAPATAN NASIONAL DAN INFLASI

Daryono Soebagiyo
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstract

Creating primary money to maintain national product growth performance can pass deficit spending policy and pushing the building of the models can get macroeconomics policy. However, this policy influences inflation, therefore real value of wealth in society properties is decreased. Hence, the deficit spending policy can be passed by printing much money to raise welfare cost can be calculated.

Keywords: *deficit spending policy, primary money, national product growth, inflationary*

PENDAHULUAN

Ahli Ekonomi yang pertama kali memasukkan peranan pemerintah dalam perekonomian adalah *John Maynard Keynes* (1936). Keynes berpendapat, bahwa depresi ekonomi yang terjadi pada tahun 1930 dapat diatasi dengan memberikan stimulus pada permintaan agregat masyarakat. Apabila *Keynes* mendefinisikan permintaan agregat (AD) sebagai penjumlahan dari besaran-besaran konsumsi (C) investasi (I) dan pengeluaran rutin pemerintah, yaitu pengeluaran (G) dikurangi pendapatan pajak (T), maka stimulus diberikan dengan mempengaruhi besaran G. Suatu kebijakan di mana pada suatu periode arus pengeluaran (ΔG) lebih besar dari pada arus penerimaan pajak (ΔT); atau $\Delta G > \Delta T$ disebut sebagai kebijakan *Deficit Spending*

Adanya penambahan pengeluaran, menyebabkan pemerintah membutuhkan sumber pembiayaan lain di luar pajak. Sumber pembiayaan tersebut dapat diperoleh melalui pinjaman pemerintah

kepada masyarakat non-bank (disebut sebagai kebijakan fiskal murni)¹ atau cetak uang (merupakan campuran antara kebijakan fiskal dan moneter). Dalam perekonomian di mana pasar surat berharga belum berkembang dengan baik, kebijakan tersebut dibiayai melalui penambahan jumlah uang primer.

PENGARUH PEMBIAYAAN KEBIJAKAN *DEFICIT SPENDING* MELALUI PENINGKATAN UANG PRIMER TERHADAP PENDAPATAN NASIONAL DAN INFLASI

Ada dua pendekatan yang membahas tentang pengaruh kebijakan deficit spending terhadap perekonomian. Pendekatan tersebut adalah:

- a. Pendekatan *budget constraint*
- b. Pendekatan Pendapatan Nasional dan Inflasi

a. Pendekatan Budget Constraint

Pendekatan ini memakai suatu pedoman, bahwa pengeluaran total pemerintah (G) harus sama dengan pembiayaan totalnya. Pembiayaan tersebut dapat berasal dari penerimaan pajak (T), pinjaman (B) dan menciptakan uang (M). Adapun asumsi yang dipakai adalah, tingkat harga konstan. Secara matematis, *budget constraint* dapat dituliskan sebagai berikut:

$$G = T(Y + B) + B = \Delta M + (1/r)\Delta B \quad (1)$$

di mana:

- ΔM = perubahan jumlah uang beredar
- ΔB = perubahan jumlah obligasi pemerintah yang dikeluarkan
- r = tingkat suku bunga obligasi dalam persen
- $(1/r)\Delta B$ = perubahan jumlah obligasi pemerintah yang dikeluarkan yang dihitung atas dasar nilai sekarang (*present value*)
- B = adalah bunga yang dibayarkan kepada pemegang obligasi Pemerintah (satuan uang)
- $T(Y+B)$ = pajak merupakan fungsi dari pendapatan dan bunga

¹ Kebijakan fiskal murni adalah kebijakan yang mempengaruhi sektor riil, tetapi tidak mempengaruhi jumlah uang beredar. (Luckett, 1981).

Keadaan keseimbangan dalam jangka panjang terjadi pada kondisi di mana $M = B = 0$, sehingga $G - T(Y+B) + B = 0$ atau $G + B = T(Y+B)$. Peningkatan pengeluaran pemerintah akan menyebabkan pendapatan nasional bergerak menuju tingkat keseimbangan baru yaitu:

$$\frac{dY}{dG} = \frac{1 + \{1 - T^\infty(B)\} dB/dG}{T^\infty(Y)} \quad (2)$$

Persamaan di atas apabila dijelaskan melalui turunan matematis alurnya adalah sebagai berikut: bahwa keseimbangan jangka panjang terjadi pada saat di mana; $G + B = T(Y+B)$. Tingkat pendapatan nasional setelah terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah adalah:

$$1) \quad dG + dB = \frac{dT}{dY} dY + \frac{dT}{dB} dB$$

Persamaan (1) dibagi dengan dG , sehingga dapat diperoleh persamaan (2), yaitu:

$$2) \quad 1 + \frac{dB}{dG} = \frac{dT}{dY} \frac{dY}{dG} + \frac{dT}{dB} \frac{dB}{dG}$$

atau;

$$1 + \frac{dB}{dG} = \frac{dT}{dB} \frac{dB}{dG} = \frac{dT}{dY} \frac{dY}{dG}$$

Dengan demikian, pendapatan nasional yang terjadi pada keseimbangan baru adalah:

$$3). \quad \frac{dY}{dG} = \frac{1 + dB/dG - (dT/dB)(dB/dG)}{dT/dY}$$

atau;

$$\frac{dY}{dG} = \frac{1 + \{1 - T^\infty(B)\} dB/dG}{T^\infty(Y)}$$

di mana $T^\infty(B) = dT/dB$ dan,
 $T^\infty(Y) = dT/dY$

Apabila pengeluaran tersebut dibiayai melalui penambahan jumlah uang beredar (sehingga $dB/dG = 0$), maka peningkatan pendapatan nasional yang terjadi sebesar:

$$\frac{dY}{dG} = \frac{1}{T^\infty} \quad (3)$$

di mana: $1/T^\infty$ merupakan koefisien multiplier dan $T^\infty = \Delta T/\Delta Y$

b. Pengaruh Kebijakan Deficit Spending terhadap Pendapatan Nasional dan Inflasi

Pengaruh kebijakan deficit spending terhadap pendapatan nasional dan inflasi dapat diterangkan melalui analisis pasar barang (kurva IS) dan pasar uang (kurva LM) yang dikembangkan oleh *John R. Hicks*. Secara garis besar, analisis IS-LM dapat diterangkan sebagai berikut.

Kurva IS dan LM adalah kurva-kurva yang merupakan tempat kedudukan berbagai kombinasi jumlah riil uang tunai yang di tahan (m) dengan tingkat suku bunga yang menjamin pasar barang dan pasar uang tetap berada pada keadaan keseimbangan. Artinya, penawaran sama dengan permintaan pasar uang dan pasar barang, menggunakan definisi tingkat suku bunga yang berbeda. Pasar uang menggunakan tingkat suku bunga nominal (i), sedangkan pasar barang menggunakan tingkat suku bunga riil (r). Hubungan antara keduanya dapat dinyatakan sebagai:

$$i = r + INFL^-$$

di mana: $INFL^-$ adalah tingkat inflasi yang diekspektasikan

Dalam pasar barang, kondisi seimbang ditunjukkan oleh suatu kondisi di mana tabungan (S) = investasi (I). Adapun fungsi tabungan dan investasi dapat dinyatakan sebagai:

$$I = f(r) \quad (4)$$

$$S = f(a) \quad (5)^2$$

di mana: $\partial S/\partial a < 0$; $\partial I/\partial r < 0$

a = A/P = jumlah kekayaan riil yang dimiliki

A = jumlah kekayaan nominal yang dimiliki. Kekayaan terdiri atas uang tunai dan surat berharga.

Kurva IS memiliki kemiringan positif, karena peningkatan jumlah uang tunai riil, yang menyebabkan $S < I$, harus diimbangi oleh penurunan investasi melalui peningkatan suku bunga riil.

Selanjutnya, keseimbangan pasar uang (LM) ditunjukkan oleh suatu kondisi di mana penawaran uang riil (M/P) = permintaan jumlah uang tunai riil (M/P)⁰. Fungsi permintaan uang dapat dinyatakan sebagai:

$$(M/P)^0 = m(i., y)a; \quad 0 < m(i., y) < i \quad (6)$$

$$M/P = (M/P)^0 \quad (7)$$

di mana: $y = Y/P$ = jumlah pendapatan riil

Y = jumlah pendapatan nominal

P = harga umum

$\partial (M/P)/\partial y > 0$ dan $\partial (M/P) / \partial i < 0$

$m(i., y)$ merupakan bagian kekayaan yang dipegang dalam bentuk uang tunai.

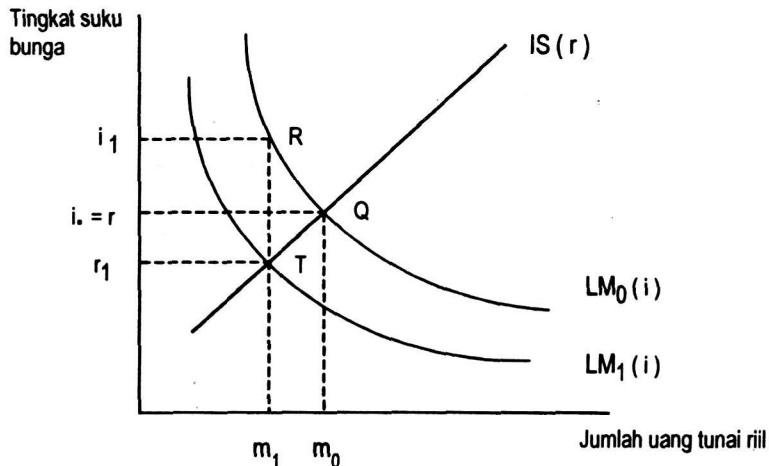
² Ahli ekonomi yang pertama kali memasukkan nilai kekayaan riil dalam fungsi tabungan adalah Pigoe. Oleh sebab itu pengaruh kekayaan terhadap tabungan sering disebut sebagai pengaruh Pigoe (*Pigoe Effect*)

Berdasarkan persamaan (6) dan (7), maka kurva LM mempunyai kemiringan negatif. Hal ini disebabkan, karena peningkatan jumlah uang tunai riil akan meningkatkan kekayaan riil yang dimiliki secara proporsional. Adanya asumsi, bahwa $0 < m(i, y) < 1$ menyebabkan peningkatan permintaan jumlah uang tunai riil akan lebih kecil daripada peningkatan kekayaan yang terjadi.

Akibatnya, terjadi kelebihan jumlah uang beredar di pasar uang. Untuk menjaga agar pasar uang tetap berada pada keseimbangan, maka keadaan ini harus diimbangi oleh penurunan suku bunga nominal, sehingga permintaan uang untuk kebutuhan spekulasi meningkat. Dengan demikian, permintaan uang tunai riil akan meningkat pula.

Berdasarkan analisis kurva IS-LM di atas, maka pengaruh penambahan jumlah uang beredar, secara terus menerus, terhadap sektor riil dapat dijelaskan melalui Gambar.1, di bawah ini:

Gambar 1. Analisis IS - LM



Pada keadaan awal (Q), tingkat suku bunga riil (r) sama dengan tingkat suku bunga nominal (i), jumlah uang riil yang ditahan sebesar Om_0 dan tingkat inflasi sama dengan 0.

Peningkatan pengeluaran pemerintah yang dibiayai melalui pinjaman kepada bank sentral akan mempengaruhi jumlah kekayaan yang dimiliki masyarakat. Peningkatan kekayaan akan mendorong

peningkatan permintaan uang riil yang ditahan. Dalam persamaan (6) dan (7) terlihat, bahwa peningkatan jumlah uang riil yang ditahan akan lebih kecil daripada penambahan jumlah uang yang beredar yang terjadi [kondisi ini ditunjukkan oleh nilai $0 < m(i, y) < 1$]. Akibatnya, terjadi kelebihan jumlah uang beredar dalam pasar uang. Adanya kelebihan jumlah uang beredar akan mendorong terjadinya peningkatan harga.

Kelebihan jumlah uang beredar di pasar uang secara terus menerus sebagai akibat peningkatan pengeluaran pemerintah akan mendorong terjadinya inflasi. Inflasi yang terjadi pada gilirannya akan menyebabkan timbulnya kesenjangan antara tingkat suku bunga nominal dan tingkat suku bunga riil sebesar nilai inflasi tersebut. Dalam Gambar 1. di atas dinyatakan bahwa kurva LM merupakan fungsi dari tingkat suku bunga nominal, maka penurunan tingkat suku bunga riil sebagai akibat peningkatan harga akan menggeser kurva tersebut ke kiri sejauh tingkat inflasi yang terjadi (RT). Dengan demikian, masyarakat akan memegang uang tunai sebesar Om_1 , apabila tingkat suku bunga nominal dan riil masing-masing sebesar Oi_1 dan Or_1 . Bidang $i_1 r_1$ RT merupakan penurunan nilai uang riil yang terjadi sebagai akibat inflasi.

Dalam pasar barang, inflasi yang terjadi akan meningkatkan tabungan (menurunkan konsumsi) dan meningkatkan investasi. Tabungan meningkat, karena adanya penurunan nilai kekayaan riil yang dipegang dari Om_0 ke Om_1 , sebaliknya investasi meningkat sebagai akibat penurunan tingkat suku bunga riil dari Or_0 ke Or_1 . Dengan demikian, pada tingkat keseimbangan baru, yaitu T, tingkat investasi dan tabungan akan lebih besar daripada tingkat keseimbangan awal (Q).

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa investasi akan meningkat sebagai akibat peningkatan suku bunga nominal yang lebih kecil daripada tingkat inflasi yang terjadi. Dengan demikian, sampai batas tertentu inflasi akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

PENDAPATAN PAJAK INFLASI

Dalam negara sedang berkembang, di mana pasar uang dan sistem perpajakan belum berkembang dengan baik, pengaruh inflasi terhadap distribusi pendapatan tersebut seringkali digunakan sebagai suatu cara untuk meningkatkan persentase pendapatan pemerintah terhadap pendapatan nasional. Pendapatan pemerintah dengan cara ini bisa disebut sebagai pendapatan pajak inflasi.

Pendapatan pajak inflasi dimungkinkan, karena adanya fungsi uang sebagai alat tukar dan fungsi uang sebagai penyimpan kekayaan. Sebagai alat tukar dan penyimpan kekayaan, maka jumlah uang riil yang ditahan ditentukan oleh tingkat pendapatan dan *Opportunity Cost* memegang uang. *Cagan* (1956) memasukkan tingkat inflasi yang diharapkan sebagai *Opportunity Cost* memegang uang tunai³. Dengan demikian, adanya inflasi akan menurunkan jumlah uang riil yang ditahan.

Adanya asumsi, bahwa masyarakat ingin mempertahankan sejumlah tertentu uang tunai riil yang ditahan untuk memenuhi kebutuhan transaksinya, maka penurunan tersebut harus ditutupi oleh sejumlah uang riil tertentu yang berasal dari pendapatannya. Tambahan sejumlah uang riil inilah yang merupakan *pendapatan pajak inflasi* yang ditarik dari masyarakat.

Oleh *Friedman* dikatakan bahwa pendapatan pajak inflasi yang dapat ditarik pemerintah mempunyai batas maksimal. Secara matematis batas maksimal tersebut dapat diturunkan berdasarkan suatu fungsi permintaan uang yang stabil. Sedangkan pendapat *Mundell* menyatakan bahwa apabila pemerintah menggunakan pendapatan tersebut dalam pembentukan modal, maka pendapatan nasional akan dapat terjadi. Dalam hal ini *Mundell* memberikan pandangan lebih jauh bahwa hubungan antara pertumbuhan pendapatan nasional dengan inflasi akan ditentukan oleh bagaimana pemerintah menggunakan pendapatan pajak yang diperoleh dari masyarakat.

PENUTUP DAN KESIMPULAN

Tulisan ini merupakan suatu pengantar ringkas untuk melihat kebijakan *deficit spending* melalui penciptaan uang primer untuk mempertahankan tingkat laju pertumbuhan produksi nasional dan mendorong pembentukan modal.

Untuk terapannya kasus ini apabila dilakukan di Indonesia, instrumen kebijakannya akan memiliki beberapa pertimbangan dan konsekuensi: *Pertama*, pasar surat berharga di Indonesia belum berkembang dengan baik, sehingga penjualan obligasi pemerintah tidak dapat dilakukan. *Kedua*, lemahnya sistem perpajakan di

³ Besaran inflasi yang digunakan (bukan tingkat suku bunga), karena keterbatasan bentuk kekayaan finansial yang tersedia di NSB. Maka, kekayaan biasanya dipegang dalam bentuk uang tunai atau kekayaan fisik (barang).

Indonesia. *Ketiga*, inflasi yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut merupakan pajak yang dikenakan pada kekayaan yang dimiliki masyarakat. Dengan demikian, inflasi dianggap sebagai sumber pendapatan pajak yang diterima pemerintah. *Keempat*, inflasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, apabila pendapatan pajak inflasi yang diterima oleh pemerintah digunakan dalam proses pembentukan modal.

Dengan demikian, beberapa hal yang dapat disimpulkan dari tulisan ini adalah: inflasi dapat merubah distribusi pendapatan sedemikian rupa, sehingga menguntungkan pihak investor dan perbankan memperoleh keuntungan, karena tingkat suku bunga riil yang harus dibayarkan setelah terjadinya inflasi lebih rendah. Bagi pemerintah, penurunan nilai uang tunai riil sebagai akibat penambahan pinjaman pemerintah kepada bank sentral merupakan sumber pendapatan pajak yang hal ini selanjutnya disebut sebagai pajak inflasi.

Maka, sampai batas tertentu kebijakan *deficit spending* melalui penambahan jumlah uang beredar dapat digunakan untuk mempertahankan tingkat laju pertumbuhan ekonomi tertentu, serta mendorong pembentukan modal domestik bruto. Batas tersebut ditentukan oleh penerimaan pendapatan pajak inflasi.

KEPUSTAKAAN

- Blinder, A. S. and RM Solow, 1971. *Does Fiscal Policy Matter?* dalam *Issues in Monetary Theory and Policy*, Editor T Havrilesky dan J Boorman (Eds), Illinois: HM Publishing Corp.
- Branson William H, 1989. *Macroeconomics Theory and Policy*, Third Edition, Singapore: Harper Collins Publishers.
- Friedman, B.M, 1977. Empirical Issues in Monetary Policy, *Journal of Monetary Economics*, Vol 3.
- Friedman. M, 1977. *Inflation and Unemployment*, Basil Blackwell.
- Mundell, R.A., 1968. *International Economics*, MacMillan.
- Parkin Michael, 1984. *Macroeconomics*, New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Peston, M. H, 1982. *The Theory of Macroeconomics Policy*, Second Edition, Oxford: Phillip Allen Publisher.